



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Trans Lembata No. 1 Lewoleba Nubatukan Lembata Nusa Tenggara Timur
Telp. (0383) 2343335 – Laman : www.site.lembatakab.go.id
Pos-el: setda@lembatakab.go.id

NASKAH URGENSI

A. Judul

Analisis Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata

B. Latar Belakang

Rendahnya kualitas kebijakan publik selama ini pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, karena para pembuat kebijakan (*policy maker*) ketika membuat suatu kebijakan tidak didukung oleh analisis kebijakan. Padahal, peran Analisis Kebijakan sangat penting dalam memberikan masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Selama ini ada anggapan bahwa pembuatan kebijakan publik tergantung pada siapa yang mengagendakannya (*agenda setter*). Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*) dianggap sebagai pihak yang paling tahu apa kriteria dan alternatif kebijakan yang tepat untuk mengatasi suatu permasalahan publik. Padahal tugas tersebut seharusnya dilakukan oleh seorang yang berprofesi khusus, yaitu Analisis Kebijakan.

Seorang Analisis Kebijakan dikhususkan untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan analisis kebijakan merumuskan masalah, melakukan peramalan dan menyusun rekomendasi, melaksanakan pemantauan, serta menyusun evaluasi kebijakan. Namun sayangnya, di Kabupaten Lembata peran Analisis Kebijakan ini belum maksimal. Hal ini terjadi karena jabatan fungsional yang ada sebagian besar masih merupakan hasil penyetaraan, yang dalam proses pembuatan kebijakan belum lepas dari bayang-bayang tugas struktural sebelumnya. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung administratif, belum sepenuhnya berbasis analisis komprehensif, sehingga sering tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, kebutuhan jabatan fungsional Analisis Kebijakan di Kabupaten Lembata sudah sangat mendesak. Apalagi setiap tahun Pemerintah Daerah rapat bersama DPRD menghasilkan dokumen kebijakan seperti Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati, Keputusan, dan Surat Edaran maupun kebijakan distributif berupa program pembangunan.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi

a. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang Analisis Kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan suatu persoalan publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai kebijakan (*policy alternatives*) yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*).

b. Peran Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki peranan yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Howlett dan Ramesh (1995), Friedrich dan Sharsansky (1960) bahwa fungsi kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Baiknya kinerja pemerintah hanya akan tercipta jika terdapat kebijakan yang baik (*good policy*). Sedangkan, kebijakan yang baik hanya akan didapatkan melalui proses kebijakan yang baik pula (*good policy process*). Proses kebijakan melibatkan berbagai kegiatan yang kompleks. Proses kebijakan merupakan suatu siklus atau tahapan dari serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk membuat kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang bergerak dari satu tahapan ke tahapan yang lain secara berkesinambungan dan memiliki ketergantungan antar satu sama lain. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli

dipahami sebagai upaya penting dalam melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik.

Pada umumnya, tahapan proses kebijakan dimulai dari tahap penyusunan agenda, formulasi alternatif, adopsi/legitimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Walaupun setiap ilmuwan memiliki istilah dan tahapan yang berbeda, namun secara umum, model proses kebijakan merupakan siklus yang bermula dari formulasi kebijakan menuju implementasi untuk mencapai kinerja kebijakan. Siklus demikian dimaksudkan agar sebuah kebijakan dapat diputuskan secara rasional. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan suatu kebijakan dibutuhkan bukti empiris dan penilaian yang strategis. Secara spesifik, di dalam tahapan pembuatan kebijakan terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, antara lain:

1. Apa masalah kebijakan;
2. Apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan;
3. Apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut;
4. Apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan;
5. Bagaimana kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat dipahami bahwa dalam tahapan pembuatan kebijakan membutuhkan analisis kebijakan.

c. Jenjang, Definisi dan Tugas Analisis Kebijakan

1. Level

Analisis Kebijakan terbagi dalam empat level yakni Pertama, Muda, Madya dan Utama. Tiap level Analisis Kebijakan melakukan tugas dari tahapan prosedur analisis kebijakan.

2. Definisi dan Tugas

- a. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Pertama adalah analisis yang mampu mereviu dan mengidentifikasi bidang tugasnya, dengan tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja individu dan mengidentifikasi pola hubungan dalam tim kerja
- Menyusun rencana Kajian dan Analisis Kebijakan;
- Mengidentifikasi pilihan metode kajian sederhana
- Mengidentifikasi pilihan teknik dan analisis kebijakan untuk melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan
- Menyediakan data dan informasi kebijakan, bahan dan material yang relevan dengan rencana analisis, serta penggunaan logika, teori, dan *framework* yang sesuai dengan proses penyusunan saran kebijakan
- Mengidentifikasi dinamika politik dan budaya birokrasi dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan;
- Mengidentifikasi konsep regulasi dan legislasi dalam penyusunan Kajian dan Analisis Kebijakan
- Mengidentifikasi bidang pekerjaan dan hubungan kerja antar instansi dalam melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan
- Mengidentifikasi pilihan metode sederhana dalam penilaian kebijakan
- Membantu penyiapan kelengkapan penulisan naskah rekomendasi kebijakan; Mengidentifikasi dan Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok terarah rancangan kebijakan dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isi masalah dan atau kebijakan
- Mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan pelaksanaan uji publik rancangan kebijakan dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan
- Mengidentifikasi strategi komunikasi dengan kolega, atasan, dan pemangku kepentingan;
- Membangun jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi tempat bekerja;
- Mengidentifikasi hubungan dengan pihak terkait dalam proses analisis kebijakan;

- Mengidentifikasi rencana konsultasi publik dalam proses konsultasi publik atas kebijakan publik di Indonesia;
 - Menyiapkan pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan;
 - Menyiapkan pelaksanaan kegiatan diseminasi kebijakan;
 - Menulis artikel/karya ilmiah tentang kebijakan di jurnal ilmiah tidak terakreditasi dan media lokal;
 - Mengumpulkan bahan presentasi hasil Kajian dan Analisis Kebijakan; dan
 - Menulis artikel mengenai kebijakan di media massa.
- b. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda adalah analis yang mampu merumuskan permasalahan dengan menggunakan metodologi penelitian, dengan tugas sebagai berikut:
- Membentuk kompetensi manajerial dalam manajemen diri dan membangun tim;
 - Menelaah kembali rencana Kajian dan Analisis Kebijakan yang sudah dibuat oleh Analisis Kebijakan Ahli Pertama;
 - Menentukan metode kajian;
 - Menentukan teknik dan analisis kebijakan dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Mengembangkan opsi/alternatif kebijakan dari data atau informasi yang tersedia;
 - Menganalisis dinamika politik dan budaya birokrasi dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Menganalisis konsep regulasi dan legislasi dalam penyusunan Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Menganalisis pilihan metode sederhana dalam penilaian kebijakan;
 - Menulis naskah rekomendasi kebijakan berdasarkan kerangka yang telah disusun;
 - Memprakarsai pelaksanaan diskusi kelompok terarah rancangan kebijakan dengan pejabat

- publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan/atau kebijakan;
- Memprakarsai pelaksanaan uji publik rancangan kebijakan dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan;
 - Menganalisis bidang pekerjaan dan hubungan kerja antar-instansi dalam melakukan Kajian dan analisis Kebijakan;
 - Membangun jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi tempat bekerja;
 - Memprakarsai hubungan dengan pihak terkait dalam proses analisis kebijakan;
 - Memprakarsai komunikasi dengan kolega, atasan, dan pemangku kepentingan;
 - Menganalisis rencana konsultasi publik dalam proses konsultasi publik atas kebijakan publik di Indonesia;
 - Mengelola informasi proses pelaksanaan advokasi kebijakan;
 - Memberi masukan kepada Analis Kebijakan Ahli Madya dan Analis Kebijakan Ahli Utama pada isu pokok proses pelaksanaan advokasi kebijakan;
 - Mengelola informasi proses pelaksanaan diseminasi kebijakan;
 - Memberi masukan kepada Analis Kebijakan Ahli Madya dan Analis Kebijakan Ahli Utama pada isu pokok proses pelaksanaan diseminasi kebijakan;
 - Menulis artikel/karya ilmiah tentang kebijakan di jurnal ilmiah terakreditasi dan media lokal;
 - Menyusun dokumen presentasi hasil Kajian dan Analisis Kebijakan; dan
 - Menulis artikel mengenai kebijakan di media massa.
- c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya adalah analis yang mampu melakukan kajian dengan mempertimbangkan konfigurasi politik nasional, dengan tugas sebagai berikut:
- Menyusun panduan pelaksanaan rencana Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Menelaah kembali rencana kerja Analis Kebijakan dibawahnya dan memimpin kerja tim;

- Merancang metode Kajian dan Analisis Kebijakan;
- Membuat rencana teknik dan analisis kebijakan dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan;
- Mengidentifikasi semua resiko atas berbagai alternatif/opsi kebijakan;
- Mengidentifikasi hubungan hasil analisis dinamika untuk Kajian dan Analisis Kebijakan;
- Menerapkan proses regulasi dan legislasi yang berlaku di Indonesia dalam proses analisis kebijakan;
- Merancang metode dalam penilaian kebijakan;
- Menyusun kerangka naskah rekomendasi, mengompilasi dan memvalidasi serta mengoordinasikan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan;
- Menyusun strategi dan mengoordinasikan pelaksanaan diskusi kelompok terarah rancangan kebijakan dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan/atau kebijakan;
- Menyusun strategi dan mengoordinasikan pelaksanaan uji publik rancangan kebijakan dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan;
- Menganalisis isu sebuah kebijakan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya dalam bentuk dokumen;
- Menciptakan jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi tempat bekerja;
- Membangun hubungan personal dengan pihak lain untuk memaksimalkan keuntungan semua pihak dalam analisis kebijakan;
- Menyusun strategi komunikasi dengan kolega, atasan, dan pemangku kepentingan;
- Menyusun rencana konsultasi publik dalam proses konsultasi publik atas kebijakan publik di Indonesia;
- Melakukan advokasi kebijakan;
- Memperbaiki proses advokasi dan substansi kebijakan;
- Melakukan diseminasi kebijakan;

- Memperbaiki proses diseminasi kebijakan;
 - Menulis artikel/karya ilmiah tentang kebijakan di jurnal ilmiah terakreditasi dan media internasional;
 - Menciptakan jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi tempat bekerja;
 - Mempresentasikan hasil Kajian dan Analisis Kebijakan; dan
 - Menulis artikel tentang kebijakan di media massa.
- d. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Utama adalah analis yang mampu melakukan kajian strategis dengan mempertimbangkan konfigurasi politik nasional dan global, dengan tugas sebagai berikut:
- Merancang panduan rencana kerja individu dan kerja tim;
 - Memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Menilai dan mengevaluasi rancangan metode Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Menilai dan mengevaluasi rencana analisis kebijakan dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Mengantisipasi semua risiko atas berbagai alternatif/opsi kebijakan;
 - Menginterpretasikan sistem politik dan regulasi di Indonesia dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan;
 - Menginterpretasikan proses regulasi dan legislasi yang berlaku di Indonesia dalam proses analisis kebijakan;
 - Menilai metode dalam penilaian kebijakan;
 - Menelaah kembali dan menyempurnakan naskah rekomendasi kebijakan;
 - Memetakan semua kendala pelaksanaan uji publik rancangan kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - Menentukan isu sebuah kebijakan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya dalam bentuk dokumen;

- Memanfaatkan jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi tempat bekerja;
- Mengidentifikasi dan menganalisis nilai tambah hasil hubungan dengan pihak terkait dalam proses analisis kebijakan;
- Mengatasi kendala berkomunikasi dengan kolega, atasan, dan pemangku kepentingan;
- Menentukan rencana konsultasi publik dalam proses konsultasi publik atas kebijakan publik di Indonesia;
- Memimpin perumusan desain pelaksanaan advokasi kebijakan;
- Mengevaluasi efektivitas advokasi dan substansi kebijakan;
- Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;
- Menulis artikel/karya ilmiah tentang kebijakan di jurnal ilmiah terakreditasi dan media internasional;
- Menyimpulkan, mengevaluasi, dan menelaah kembali hasil Kajian dan Analisis Kebijakan melalui presentasi; dan
- Menulis artikel tentang kebijakan di media massa.

3. Kebutuhan Analisis Kebijakan

Kondisi penempatan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata masih mengikut pada jabatan struktural sebelumnya, dari data terakhir didapatkan bahwa ada beberapa yang sudah kosong pemangkunya, dan ada juga yang dirotasi untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang sangat urgen penempatannya.

Pentingnya analisis kebijakan akan berperan juga untuk menganalisis kebijakan dengan cara temu kenali permasalahan yang cocok dengan unit kerjanya pada semua lini di Perangkat Daerah, dengan cara memperbaiki sistem kerja tanpa mengubah struktur organisasi mengikuti sistem kerja baru demi terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sangat

diperlukan, baik melalui penerimaan CPNS, PPPK, maupun melalui Inpassing.

Rekapitulasi data hasil analisis kebutuhan Analisis Kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Lembata sebagaimana terlampir.

2. Ruang Lingkup

Pengusulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dari Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

D. TUJUAN

1. Terpenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusun
Penelaah Teknis Kebijakan



Yopi Handayani Siregar, S.AP

Penata Muda, III/a
NIP. 19961113 202203 2 019

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Daerah
Kabupaten Lembata



Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T

Pembina Utama Madya, IV/D
NIP. 19740415 199412 1 001